

## **KOORDINASI ANTAR ORGANISASI DALAM PENGELOLAAN PURNA TENAGA KERJA INDONESIA (TKI) DI KABUPATEN LAMPUNG TIMUR PROVINSI LAMPUNG**

**Ita Prihantika**

Jurusan Administrasi Negara FISIP Universitas Lampung

*Email: ita.prihantika@gmail.com*

**Meiliyana**

Jurusan Administrasi Negara FISIP Universitas Lampung

*Email: melyanwar@yahoo.com*

**Susana Indriyati Caturiani**

Jurusan Administrasi Negara FISIP Universitas Lampung

*Email: -*

### **ABSTRAK**

*Beberapa penelitian terdahulu memberikan gambaran bahwa diperlukan upaya dari pemerintah untuk melakukan pembinaan dan pemberdayaan ekonomi dan sosial bagi purna TKI. Di era desentralisasi, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab dan kewajiban yang cukup besar dalam urusan-urusan kesejahteraan rakyatnya. Namun, koordinasi dan komunikasi juga tetap harus dilakukan dengan pemerintah pusat, instansi-instansi vertikal yang ada di daerah serta keterlibatan pihak ketiga sebagai indikasi pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik. Secara khusus, penelitian ini bermaksud menggambarkan koordinasi antar organisasi dalam pengelolaan purna TKI di Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung.*

*Hasil penelitian mengungkapkan bahwa Pemerintah Kabupaten Lampung Timur sebagai leading sektor pada pengelolaan Purna TKI ini tidak memiliki program/kebijakan yang benar-benar spesifik. Sejauh ini, beberapa inisiatif upaya pengelolaan Purna TKI diinisiasi oleh pihak ketiga, misalnya BP3TKI, LSM SBMI dan LSM Sebumi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa koordinasi pengelolaan Purna TKI di Kabupaten Lampung Timur belum terbentuk dan berjalan.*

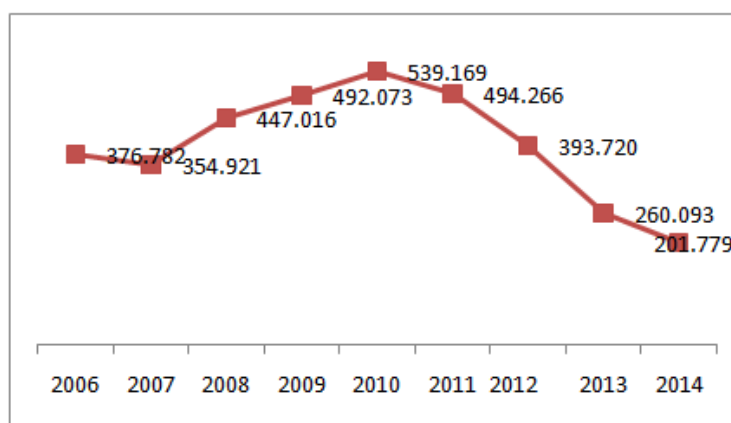
*Kata kunci: koordinasi, pengelolaan purna TKI*

### **PENDAHULUAN**

Buruh migran (dalam penelitian ini disebut TKI) merujuk pada perpindahan sementara atau tetap yang dilakukan seseorang ke negara lain untuk mencari pekerjaan atau belajar, atau melarikan diri dari kondisi politik negaranya (Goldin dan Reinert, 2006 dalam Kageyama, 2008). Terjadinya migrasi seorang atau kelompok orang dari satu wilayah ke wilayah lain disebabkan oleh beberapa faktor, yang utamanya adalah keinginan untuk hidup lebih baik dari sisi sosial, ekonomi maupun politik.

Kebijakan dalam bidang ketenagakerjaan, yaitu pengiriman tenaga kerja ke negara lain secara ekonomis berdampak positif bagi devisa negara yang dihasilkan dari

remitansi. Dampak dalam skala mikro (individu dan keluarga) adalah peningkatan pendapatan keluarga (Kageyama, 2008). Remitansi TKI yang berada di luar negeri baik dalam jangka pendek dan menengah juga telah banyak diteliti baik di Indonesia maupun negara lain (Anwar, 2013; UN, 2013; Barai, 2012). Fazili (2009) yang mengungkapkan remitansi yang diterima keluarga dapat digunakan untuk pembangunan rumah atau membuka usaha perdagangan kecil. Kedua jenis kegiatan ini dapat menyerap tenaga kerja kasar di lingkungan sekitar. Namun, Kageyama (2008) dalam penelitiannya di Sri Lanka tersebut menyimpulkan remitansi internasional tidak berdampak dalam jangka panjang. Bagaimana paska kepulangan TKI ke negara asal (purna TKI)? Apakah secara ekonomi purna TKI masih memiliki dampak ekonomi dan sosial dalam pembangunan bagi lingkungan sekitar?

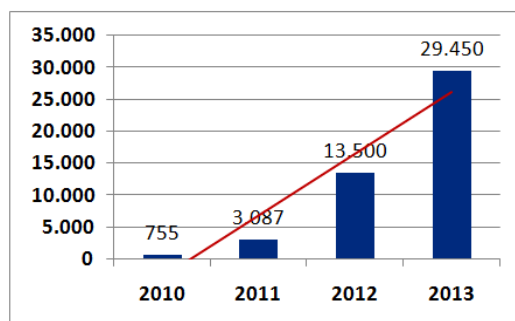


**Gambar 1. Grafik Kepulangan TKI 2006-2014**

Sumber: BNP2TKI, 2015 ([www.bnp2tki.go.id](http://www.bnp2tki.go.id))

Jika melihat data kepulangan TKI dari tahun 2006- 2014 (lihat gambar 1) dan dibandingkan dengan upaya pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah (lihat grafik 2) maka masih terdapat kesenjangan. Perhatian khusus pemerintah terhadap purna TKI ini menjadi penting, sebab purna TKI berada dalam rentang usia produktif ketika kembali ke tanah air. Menurut Ristyana dan Hamidah (2014) ancaman penganggur muda bukan hanya pencari kerja yang baru menyelesaikan sekolah atau kuliah, namun juga para Eks TKI dari luar negeri. Para purna TKI yang rata- rata masih berusia di bawah 35 tahun ketika memutuskan untuk tidak lagi bekerja di luar negeri, sehingga memperbanyak jumlah penganggur di dalam negeri. Kepulangan TKI dari luar negeri membawa masalah tersendiri karena banyak diantara mereka yang tidak biasa memanfaatkan hasil yang produktif guna melanjutkan hidup mereka didalam negeri.

Hasil yang didapat selama bekerja di luar negeri cenderung digunakan untuk kebutuhan konsumtif sehingga timbul keinginan untuk kembali lagi bekerja di luar negeri sampai usia tertentu.



**Gambar 2. Pemberdayaan Purna TKI**

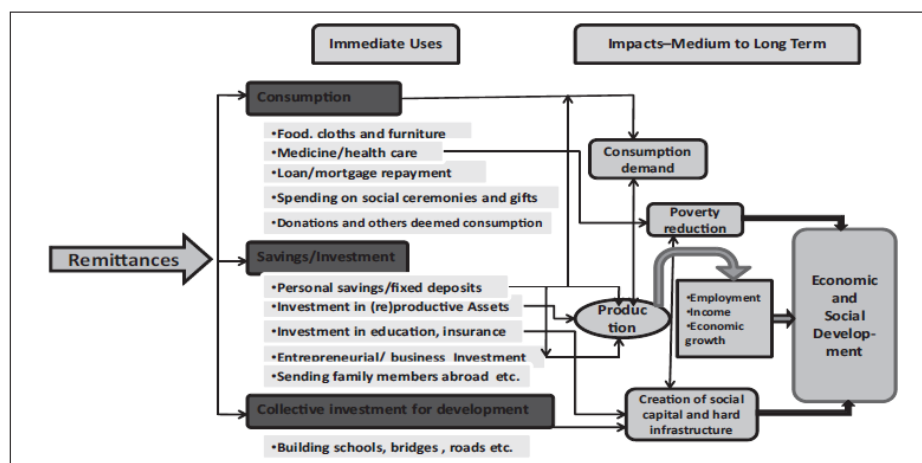
Sumber: Puslitfo BNP2TKI, 2015 ([www.bnp2tki.go.id](http://www.bnp2tki.go.id))

Salah satu upaya agar TKI, khususnya di sektor informal, tidak kembali bekerja ke luar negeri, yaitu dengan pembinaan dan pemberdayaan melalui pelatihan wirausaha. Meski sebagian besar memiliki modal untuk membuka usaha, pemerintah tetap harus mampu membuka pemikiran purna TKI untuk memiliki keinginan untuk berwirausaha. Pemerintah daerah dapat memaksimalkan program dan kegiatan untuk menanggulangi masalah kemiskinan dan pengangguran dengan cara memfasilitasi pemberdayaan masyarakat melalui bimbingan kewirausahaan purna TKI (Jaya dan Subrata, 2014). Sedangkan penelitian Abas, dkk, (2014) menyarankan bagi keluarga TKI pasca migrasi yang kondisinya belum mandiri secara ekonomi maupun sosial dilakukan pemberdayaan melalui usaha ekonomi produktif. Apalagi dengan wirausaha, TKI purna mampu mendongkrak pertumbuhan ekonomi lokal.

Pemerintah mendorong purna TKI untuk tampil sebagai wirausahawan di kampung halamannya. Agar berhasil, bekal ilmu dan praktik difasilitasi melalui program Bimbingan Teknis Pemberdayaan TKI Purna yang diadakan oleh 19 kantor Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan TKI (BP3TKI) di 19 provinsi di seluruh Indonesia. Hasilnya, beberapa penelitian melaporkan di beberapa daerah purna TKI mampu menjelma menjadi sosok wirausahawan muda. Supriana dan Nasution (2010) melakukan kajian terhadap 140 purna TKI yang memiliki usaha di Sumatera Utara; Abas, dkk (2014) memberikan alternatif model pemberdayaan purna TKI di Ponorogo; sedangkan Jaya dan Subrata (2014) menyimpulkan dalam penelitiannya bahwa ketidakmampuan purna TKI memanfaatkan modal ekonomi yang diperolehnya

sekembalinya mereka ke tanah air disebabkan kurangnya pembinaan dan bimbingan dari pemerintah sebelum dan sesudah mereka bekerja sebagai TKI.

Beberapa penelitian tersebut dapat ditarik kesimpulan perlu adanya upaya dari pemerintah melakukan pembinaan dan pemberdayaan ekonomi dan sosial para purna TKI. Kesenjangan yang ada yaitu pembinaan dan bimbingan tersebut terkadang hanya sebatas ‘proyek’ sesaat yang tidak berkelanjutan. Dalam konteks desentralisasi, pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk mensejahterakan masyarakatnya sesuai Undang-undang No 32 tahun 2004, namun disisi lain kewajiban pengelolaan TKI juga ada pada Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) dan badan/lembaga turunannya. Di luar dua institusi publik ini, masih ada institusi swasta dan pihak ketiga (*third party*) yang secara sukarela ataupun dengan motif ekonomi menaruh perhatian pada calon, TKI dan purna TKI (Chandra dan Munthe, 2011).



**Gambar 3. Dampak Ekonomi dan Sosial Remitansi**

Sumber: Barai, 2011

Penelitian tentang dampak remitansi bagi pembangunan telah banyak dilakukan. Salah satunya oleh Barai (2011). Menurut Barai, dampak remitansi dapat digolongkan dalam jangka pendek (penggunaan sesaat) dan jangka menengah-panjang. Dalam jangka pendek, remitansi digunakan untuk kebutuhan konsumtif (makanan, pakaian, mebel, kesehatan, pembayaran hutang, kebutuhan sosial/hadiah, dipinjamkan); tabungan/investasi (tabungan pribadi, investasi pada aset produktif, asuransi pendidikan, investasi bisnis, pengiriman untuk famili lain); investasi bersama dalam pembangunan (misal sekolah, jembatan, jalan, dll). Adapun dampak jangka menengah-panjang,

beberapa konsumsi jangka pendek tadi dapat meningkatkan agregat permintaan konsumsi masyarakat, meningkatkan produksi barang, mengurangi tingkat kemiskinan serta menciptakan modal sosial dan infrastruktur keras. Dalam jangka panjang, dampak jangka menengah tadi akan membuka lapangan kerja baru sehingga menambah penghasilan masyarakat sekitar dan pertumbuhan ekonomi. Secara akumulatif jika skema ini berjalan dengan baik akan berdampak pada peningkatan pembangunan ekonomi dan sosial (selengkapnya lihat gambar 2).

Pengelolaan purna TKI tidak bisa dilakukan sendirian oleh Pemerintah atau lembaga lain. Dalam konteks kerja, perlu adanya koordinasi antar stakeholder yang terlibat. Koordinasi berasal dari kata *coordination*, *co* dan *ordinare* yang berarti *to regulate* dari pendekatan empirik yang dikaitkan dengan etimologi, koordinasi diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan oleh berbagai pihak yang sederajat (*equal in rank or order, of the same rank or order, not subordinate*) untuk saling memberi informasi dan mengatur (menyepakati) hal tertentu (Ndraha, 2011). Secara normatif, koordinasi diartikan sebagai kewenangan untuk menggerakkan, menyasikan, menyelaraskan, dan menyeimbangkan kegiatan-kegiatan yang spesifik atau berbeda-beda agar semuanya terarah pada tujuan tertentu. Sedangkan secara fungsional, koordinasi dilakukan guna untuk mengurangi dampak negatif spesialisasi dan mengefektifkan pembagian kerja (Ndraha, 2011).

Ndraha (2011) megatakan bahwa koordinasi dapat diukur melalui proses manajemen, yang perlu diukur adalah:

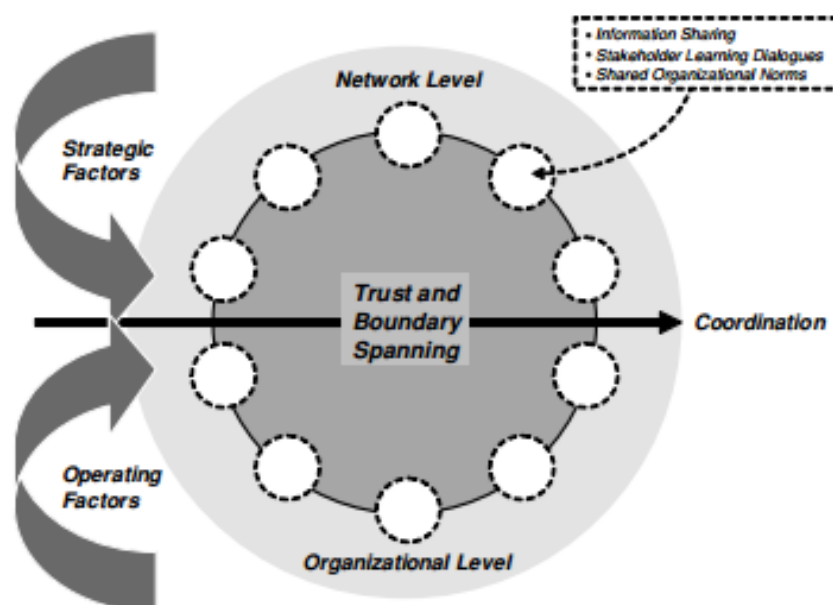
- 1) *Informasi, komunikasi, dan teknologi informasi.* Komunikasi adalah kunci koordinasi yan efektif, koordinasi secara langsung tergantung pada perolehan penyebaran dan pemrosesan informasi, semakin besar ketidakpastian tugas yang dikoordinasikan, semakin membutuhkan informasi untuk alasan ini, koordinasi pada dasarnya merupakan tugas pemrosesan informasi, sedangkan teknologi informasi dapat dilakukan dengan menggunakan alat seperti email dan sebagainya untuk mempermudah proses koordinasi tersebut.
- 2) *Kesadaran pentingnya koordinasi; berkoordinasi; koordinasi di dalam setiap tugas dan pekerjaan.* Kesadaran merupakan sesuatu yang dimiliki oleh manusia yang sesuai dengan yang dinyakininya. Kesadaran merupakan hal yang sangat berkaitan dengan manusia bahkan dengan hal ini lah manusia dapat dibedakan

dengan binatang. Kesadaran pada dasarnya keadaan sadar bukan merupakan keadaan pasif melainkan suatu proses yang aktif, kegiatan hakiki pada kesadaran adalah menindak dan mengatakan tidak.

- 3) *Kompetensi partisipan, kalender pemerintahan.* Peserta forum koordinasi harus berkompoten mengambil keputusan untuk menjamin kehadiran pejabat yang demikian, harus ditetapkan kalender pemerintahan (koordinasi) yang diataati sepenuhnya dari atas ke bawah.
- 4) *Kesepakatan dan komitmen.* Kesepakatan dan komitmen harus diagendakan (diprogramkan) oleh setiap pihak secara institusional (formal).
- 5) *Penetapan kesepakatan.* Penetapan kesepakatan yang dilakukan oleh setiap pihak yang berkoordinasi.
- 6) *Insentif koordinasi.* Yaitu sanksi bagi pihak yang ingkar atau tidak menaati kesepakatan bersama. Sanksi itu datang dari pihak atasan yang terkait.
- 7) *Feedback.* Sebagai masukan umpan-balik ke dalam proses koordinasi selanjutnya.

Penelitian yang dilakukan oleh Stephenson (2006) mendeskripsikan model koordinasi pada lembaga-lembaga kemanusiaan. Penelitian ini dianggap mirip dengan rancangan penelitian yang diajukan oleh peneliti sehingga digunakan sebagai salah satu acuan ilmiah. Stephenson menyimpulkan jaringan sosial dan koordinasi antar organisasi yang terlibat dalam penanganan misi kemanusiaan harus dikondisikan ulang, terkait kekuasaan dan kewenangan menangani sebuah situasi tertentu. Salah satu masukan Stephenson adalah penggunaan perspektif strategi kontinjensi untuk mengatasi dilema dalam melakukan koordinasi.

Penelitian yang dilakukan oleh Stockton (2002 dalam Stephenson, 2006) mengatakan efektivitas kordinasi antar lembaga dapat dicapai melalui aplikasi hirarki integrasi struktural dan spektrum kontrol kewenangan yang luas. Kegagalan koordinasi dapat terjadi disebabkan ketiadaan strategi umum dan objektif diantara organisasi-organisasi yang terlibat, atau karena lemahnya instrumen kebijakan yang ada.



Gambar 4. Implementasi Model Struktur Jaringan Lembaga Kemanusiaan  
Sumber: diadaptasi dari Stockton (2002) dalam Stephenson, 2006.

Di era desentralisasi ini, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab dan kewajiban yang cukup besar dalam urusan-urusan kesejahteraan rakyatnya. Namun, koordinasi dan komunikasi juga tetap harus dilakukan dengan pemerintah pusat, instansi-instansi vertikal yang ada di daerah serta keterlibatan pihak ketiga sebagai indikasi pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik. Pada ranah yang hampir serupa, hasil penelitian Munawaroh (2015) mengenai prosesrekrutmen buruh migran di Kabupaten Lampung Timur disimpulkan bahwa selama ini koordinasi yang dilakukan oleh *multistakeholder* dari pihak pemerintah yang terdiri dari Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lampung Timur, Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Provinsi Lampung dan Kelurahan, serta dari pihak swasta sebagai unit Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) yang diwakili oleh PT. WAHANAKARYA SUPLAINDO cabang Way Jepara, Kabupaten Lampung Timur telah berjalan namun belum maksimal.

Berbagai temuan dan kesimpulan penelitian-penelitian sebelumnya mengatakan bahwa pengelolaan purna TKI merupakan hal yang penting, pertama ditinjau dari sisi bahwa remittance yang selama ini dibawa ke tanah air mencapai angka yang tinggi, kedua, bahwa koordinasi antar berbagai stakeholder selama ini dalam pengelolaan TKI belum dilakukan secara maksimal. Secara khusus, artikel ini hendak menggambarkan

koordinasi antar organisasi dalam pengelolaan purna TKI di Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung

## METODE

Penelitian ini dirancang sebagai penelitian yang bermaksud menggambarkan kondisi, permasalahan dan potensi dalam penangan TKI Purna di Kabupaten Lampung Timur. Kebijakan dan program pemerintah daerah, intervensi *third party* (LSM dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan) serta kondisi TKI Purna akan dipetakan untuk menemukan *leverage point* yang dapat menggiring pada penemuan solusi atas kebijakan TKI Purna. Pendekatan kualitatif digunakan untuk mendapatkan gambaran yang mendalam tentang subyek yang diteliti. Penelitian kualitatif menunjuk dan menekankan pada proses dan berarti tidak diteliti secara ketat dilihat dari kualitas, jumlah, intensitas atau frekuensi. Penelitian ini mencoba menjawab pertanyaan yang menekankan bagaimana sosial diciptakan dan diberi arti (Salim, 2006).

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif; dengan tipe penelitian deskriptif. Sumber data dalam penelitian ini adalah orang-orang yang dianggap tahu dengan fenomena yang diteliti dan dipilih berdasarkan pada kriteria yang disepakati tim peneliti sehingga subjeknya terbatas. Sumber data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data primer yang langsung di dapat dari pihak pertama dan data sekunder dari pihak kedua.

Data primer diperoleh dari wawancara dan FGD kepada *stakeholder* yang terkait: BNP2TKI Provinsi Lampung, Pemerintah Kabupaten Lampung Timur, Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinoskertrans) Kab. Lampung Timur, LSM penggiat pemberdayaan TKI Purna Sebumi, Serikat Buruh Migran Indonesia (SBM) Kab. Lampung Timur, SBMI Provinsi Lampung dan TKI Purna. Data sekunder diperoleh melalui data tertulis berupa dokumen wawancara *pers*, rekaman wawancara *pers*, arsip/kliping berita, dokumen pemerintah, hasil wawancara pihak ketiga, dll.

Pemilihan lokasi Kabupaten Lampung Timur dengan beberapa pertimbangan, yaitu daerah ini merupakan pengirim buruh migran terbesar di Provinsi Lampung. Hasil penelusuran data sekunder memperlihatkan bahwa terdapat kelompok-kelompok pemberdayaan Purna TKI yang telah hidup dan berkembang di Kabupaten ini, misalnya



kelompok Peternak Ikan di Desa Bale Endah, Pasar Purna TKI di Desa Labuhanratu, dan kelompok Peternak Kambing di Batangrejo.

## PEMBAHASAN

Latar belakang atau daya tarik masyarakat untuk menjadi TKI adalah orang-orang yang sukses setelah bekerja sebagai TKI di luar negeri. Karena pada umumnya setelah pulang dari luar negeri, Purna TKI bersikap konsumtif dengan mempergunakan uangnya untuk membangun rumah, membeli sawah, motor, perhiasan, baju baru, sehingga masyarakat awam menilai bahwa dengan bekerja sebagai TKI akan merubah kehidupan mereka menjadi sejahtera. Masyarakat menilai bekerja sebagai TKI tidak membutuhkan pendidikan yang tinggi dan keahlian khusus, tapi dapat memberi penghasilan yang cukup besar. Hal ini menjadi magnet yang kuat untuk menarik minat masyarakat. Meski pada prakteknya, setelah uang Purna TKI habis untuk kegiatan konsumtif, sebagian besar Purna TKI ini akan bekerja lagi menjadi TKI. Bagi TKI yang cerdas, uang hasil bekerja sebagai TKI digunakan sebagai modal untuk berwirausaha. Namun, cukup sulit merubah *mindset* pekerja yg biasa kerja untuk berwirausaha.

Kegiatan pengelolaan Purna TKI merupakan kegiatan yang melibatkan banyak aktor. Dengan demikian, koordinasi juga melibatkan banyak *stakeholder*. Dalam konteks ini koordinasi diartikan sebagai kewenangan untuk menggerakkan, menyasikan, menyelaraskan, dan menyeimbangkan kegiatan-kegiatan yang spesifik atau berbeda-beda agar semuanya terarah pada tujuan tertentu. Sedangkan secara fungsional, koordinasi dilakukan guna untuk mengurangi dampak negatif spesialisasi dan mengefektifkan pembagian kerja. Koordinasi yang dimaksud dalam artikel ini berarti dilakukan oleh *stakeholder* yang terlibat dalam pemberdayaan Purna TKI, yaitu aktor pada level pengambilan kebijakan (Pemerintah Daerah dan DPRD), aktor pusat (BP3TKI), aktor ketiga yaitu penggiat lembaga swadaya masyarakat (Sebumi dan SBMI).

Sebagai *leading sektor*, tim penulis melihat bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur dalam hal ini Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi merupakan aktor yang langsung terlibat dalam pengelolaan Purna TKI. Apakah koordinasi ini sudah dilakukan secara efektif dan efisien? Dalam temuan lapangan, beberapa indikator koordinasi yang ditemukan adalah sebagai berikut:

### ***Informasi, Komunikasi, dan Teknologi Informasi***

Komunikasi adalah kunci koordinasi yang efektif, koordinasi secara langsung tergantung pada perolehan penyebaran dan pemrosesan informasi, semakin besar ketidakpastian tugas yang dikoordinasikan, semakin membutuhkan informasi untuk alasan ini, koordinasi pada dasarnya merupakan tugas pemrosesan informasi, sedangkan teknologi informasi dapat dilakukan dengan menggunakan alat seperti email dan sebagainya untuk mempermudah proses koordinasi tersebut.

Pada indikator pertama ini, penulis berpendapat bahwa *leading sektor* proses informasi, komunikasi dan teknologi informasi adalah Pemerintah Daerah dalam hal ini dibawah tupoksi Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsoskertrans). Dalam temuan dilapangan proses penyebaran informasi dan komunikasi ini baru sebatas pada muatan-muatan yang bersifat umum. Misalnya ketika ada pelatihan atau sosialisasi tentang pembinaan usaha kecil (UMKM) maka Dinsoskertrans akan melakukan komunikasi dalam hal undangan untuk menghadiri pelatihan atau sosialisasi. Namun dari beberapa kali kegiatan pelatihan dan sosialisasi ini tidak secara spesifik melibatkan Purna TKI, kelompok Purna TKI atau LSM Sebumi dan SBMI untuk terlibat dalam perancangan kegiatan. Informasi dan komunikasi hanya sebatas pada penyampaian informasi adanya kegiatan pelatihan dan sosialisasi saja.

Untuk pihak DPRD, informasi dan komunikasi dilakukan secara informal karena memiliki kedekatan secara personal dengan LSM Sebumi. Contohnya dalam hal masukan/pendapat tentang Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pemberdayaan Purna TKI. DPRD sudah memiliki inisiatif untuk memasukkan Raperda ini pada Prolegda 2017 yang akan datang. Sedangkan komunikasi yang dilakukan dengan SBMI Kab. Lampung Timur juga dilakukan secara informal, misalnya dalam beberapa kesempatan pertemuan dengan anggota DPRD, para penggiat LSM ini memberi masukan untuk membuat pusat informasi TKI di setiap Desa. Hal ini dimaksudkan sebagai pusat informasi dan komunikasi antara pemerintah daerah dengan masyarakat di tingkat akar rumput. Namun terkendala masalah dana yang tidak memiliki alokasi khusus dalam pembuatan pusat informasi ini.

Teknologi informasi yang digunakan belum dimanfaatkan secara maksimal. Dalam kesempatan wawancara yang dilakukan, tim penulis bertanya tentang data-data pemberdayaan TKI dan pengelolaan yang selama ini sudah dilakukan. Namun,

Dinsoskertrans belum memiliki data secara spesifik dan rigid tentang pengelolaan Purna TKI ini. Koordinasi yang dilakukan selama ini dilakukan dalam kegiatan pertemuan langsung secara tatap muka maupun melalui surat-menyurat dalam konteks undangan kegiatan sosialisasi dan pelatihan masyarakat.

### ***Kesadaran Pentingnya Koordinasi***

Kesadaran pentingnya koordinasi, berkoordinasi dan koordinasi di dalam setiap tugas dan pekerjaan. Kesadaran merupakan sesuatu yang dimiliki oleh manusia yang sesuai dengan yang dinyakininya. Kesadaran merupakan hal yang sangat berkaitan dengan manusia bahkan dengan hal ini lah manusia dapat dibedakan dengan binatang. Kesadaran pada dasarnya keadaan sadar bukan merupakan keadaan pasif melainkan suatu proses yang aktif, kegiatan hakiki pada kesadaran adalah menindak dan mengatakan tidak.

Pada temuan lapangan, level kesadaran sudah dimiliki oleh setiap *stakeholder* yang idealnya terlibat dalam pengelolaan Purna TKI ini. Seperti data yang diperoleh ketika melakukan wawancara dengan Ketua LSM Sebumi, Ketua SBMI Lampung Timur, dan Pengurus SBMI Provinsi Lampung. Ketiganya mengamini bahwa diperlukan forum dan wadah khusus untuk lebih meningkatkan perhatian kepada Purna TKI. Selama ini, pembekalan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah ketika TKI hanya sebatas pada tahap persiapan keberangkatan. Namun selama di negara tujuan dan setelah kepulangan belum ada perhatian secara khusus. Kesadaran ini juga dimiliki oleh Anggota DPRD dan Kasi Dinsoskertrans juga menyadari perlu adanya koordinasi lebih intens dalam hal pengelolaan Purna TKI. Namun, secara dalam hal regulasi dan pendanaan, kedua *stakeholder* ini mengatakan kendala yang ada karena belum masuk prioritas dalam APBD.

### ***Kompetensi Partisipan dan Kalender Pemerintahan***

Peserta forum koordinasi harus berkompeten mengambil keputusan untuk menjamin kehadiran pejabat yang demikian, harus ditetapkan kalender pemerintahan (koordinasi) yang diataati sepenuhnya dari atas ke bawah. Pada indikator ini, kompetensi partisipan yang idelanya terlibat sudah baik. Misalnya Dinsoskertrans dan DPRD adalah dua perwakilan pemerintah daerah yang memang memiliki kompetensi dalam pengelolaan Purna TKI. DPRD berada pada level pembuatan kebijakan,

sedangkan pemerintah daerah dalam hal ini Dinsoskertrans adalah eksekutif yang menjalankan kebijakan. Kompetensi DPRD juga diungkapkan oleh Ibu Hermin Anggota DPRD Komisi 4 yang mengungkapkan bahwa DPRD sudah memasukkan pengelolaan Purna TKI dalam Program Legislasi Daerah 2017. Sedangkan BNP3TKI Provinsi Lampung melalui Bidang Perlindungan dan Penempatan TKI menunjukkan kompetensinya melalui berbagai macam kegiatan pemberdayaan Purna TKI. Hampir semua kegiatan pemberdayaan Purna TKI yang dilakukan di Kabupaten Lampung Timur dinisiasi oleh BNP3TKI pada level pemerintahan. Sedangkan Pemerintah Kabupaten dan DPRD belum menunjukkan kompetensi riilnya pada level praktek pengelolaan Purna TKI di lapangan.

Pada taraf akar rumput, LSM Sebumi dan LSM SBMI menunjukkan bahwa mereka memiliki kompetensi dalam konteks pengelolaan Purna TKI. Ketua LSM Sebumi Imam Nahrowi adalah purna TKI Korea yang berhasil dan menginisiasi pembentukan Pasar Purna TKI di Desa Labuhanratu. Selain itu, Imam Nahrowi sering diundang oleh BNP2TKI ke beberapa negara tujuan TKI, seperti Korea Selatan dan Hongkong untuk mengisi kegiatan sosialisasi dan motivasi berwirausaha setelah pulang ke kampung halaman. Pada level Nasional, Imam Nahrowi juga sering menjadi narasumber di kegiatan-kegiatan dalam Provinsi Lampung bahkan pada daerah-daerah di luar Provinsi Lampung. Kompetensi Imam juga telah diliput oleh media nasional, terutama untuk menginspirasi Purna TKI agar mampu memberdayakan diri sendiri dan masyarakat di sekitarnya.

Pada level lebih sempit, Ketua SBMI Lampung Timur Sukendar dan Pengurus SBMI Provinsi Lampung Yuni Taurhani, juga merupakan narasumber-narasumber pelatihan dan sosialisasi yang dilakukan oleh Dinsoskertrans. Dalam *hearing* dengan DPRD terkadang perwakilan kedua LSM ini juga diundang. Hal ini ditegaskan juga oleh Ibu Hermin selaku anggota DPRD.

Pada indikator kalender pemerintah, dikarenakan koordinasi hanya bersifat insidental dan tidak dipayungi oleh kesepakatan yang resmi, maka kalender atau jadwal untuk melakukan koordinasi antar stakeholder juga belum ada.

### ***Kesepakatan dan Komitmen***

Kesepakatan dan komitmen harus diagendakan (diprogramkan) oleh setiap pihak secara institusional (formal). Jika merujuk pada definisi tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa indikator kesepakatan dan komitmen belum ada. Harapan para informan bahwa kesepakatan dan komitmen ini akan memiliki payung hukum jika Perda tentang pengelolaan TKI dapat disahkan pada Prolegda 2017 yang akan datang.

Ketika hal ini ditanyakan kepada Dinsoskertrans, LSM Sebumi, dan LSM SBMI, ketiganya berpandangan bahwa kesepakatan dan komitmen yang selama ini dilaksanakan hanya sebatas pada kegiatan-kegiatan umum tentang peningkatan kesadaran berusaha masyarakat, bukan pada segmen khusus Purna TKI.

### ***Penetapan Kesepakatan***

Penetapan kesepakatan yang dilakukan oleh setiap pihak yang berkoordinasi. Sejalan dengan indikator sebelumnya, dikarenakan belum adanya kesepakatan dan komitmen, sehingga tidak ada penetapan kesepakatan khusus terkait dengan pengelolaan Purna TKI di Kabupaten Lampung Timur. Hasil wawancara kepada Kasi Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja, Dinsoskertrans, Lampung Timur mengungkapkan bahwa program pemberdayaan bagi angkatan kerja dan masyarakat di Lampung Timur belum secara spesifik menjadikan purna TKI dan keluarga sebagai target sasaran khusus. Menurut informan, Bupati targetnya memberi banyak pelatihan kepada masyarakat umum untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat Lampung Timur. Dengan meningkatnya taraf hidup masyarakat, diharapkan angka kriminalitas menurun. Bupati berupaya memberi pelatihan dan motivasi kepada purna buruh migran untuk berwirausaha. Pelatihan tersebut melibatkan BP3TKI, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan purna buruh migran.

Target yang ingin dicapai adalah perluasan kesempatan kerja kepada masyarakat Lampung Timur, khususnya kepada purna TKI agar mereka memiliki pekerjaan yang layak sehingga tidak berkeinginan untuk kembali menjadi TKI. Rendahnya pendidikan, minimnya keterampilan dan tuntutan ekonomi mendesak masyarakat memilih untuk menjadi TKI yang diyakini dapat memperbaiki taraf hidup mereka. Target dari Kementerian Tenaga Kerja dan BNP2TKI adalah memberi pelatihan kepada masyarakat dan memberi motivasi untuk berwirausaha.

### ***Insentif Koordinasi***

Insentifkoordinasi adalah sanksi bagi pihak yang ingkar atau tidak menaati kesepakatan bersama. Sanksi itu datang dari pihak atasan yang terkait. Kondisi pada indikator ini juga hampir sama dengan dua indikator sebelumnya. Tidak adanya kesepakatan formal yang telah dilakukan oleh *stakeholder* yang terlibat sehingga tidak ada mekanisme *reward and punishment*.

### ***Feedback***

Feedback sebagai masukan umpan-balik ke dalam proses koordinasi selanjutnya. Koordinasi yang hanya bersifat parsial dan insidental terkadang tidak ditindaklanjuti dengan umpan balik untuk kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan Purna TKI di masa mendatang. Usulan dan masukan yang diberikan LSM Sebumi dan LSM SBMI selama ini hanya sebatas disampaikan pada pihak-pihak DPRD dan Pemerintah Daerah. Namun, tidak adanya kesempatan yang mengikat diantara mereka dalam pengelolaan Purna TKI mengakibatkan tidak adanya keharusan untuk menerima masukan dan melakukan perbaikan dalam pengelolaan Purna TKI.

BP3TKI Provinsi Lampung dinilai selangkah lebih maju dalam pengelolaan Purna TKI. Mulai tahun 2015, program pemberdayaan dilaksanakan dalam bentuk kegiatan pembinaan kewirausahaan dimulai dengan 10 kelompok pembinaan dimana tiap-tiap kelompok beranggotakan sekitar 25 orang. 6 paket pembinaan di Kabupaten Lampung Timur, 2 paket pembinaan di Bandar Lampung, 1 paket pembinaan di Kabupaten Lampung Selatan, dan 1 paket pembinaan di Pringsewu. Sedangkan untuk tahun 2016, ada 4 kelompok pembinaan yang dipilih berdasarkan basis/titik daerah yang mayoritas masyarakatnya berprofesi sebagai TKI. Untuk Kabupaten Lampung Timur, terdapat 3 titik yaitu Kecamatan Labuhan Ratu, Kecamatan Braja Caka, Kecamatan Purbolinggo (Taman Endah), dan lainnya di wilayah Natar. Jenis pembinaan yang dilakukan diantaranya seperti budidaya jamur tiram, budidaya ikan lele, budidaya sayur organik.

Kegiatan pembinaan kewirausahaan dilakukan selama sekitar satu minggu. Kegiatan Pembinaan Kewirausahaan ini telah dilaksanakan pada pekan ketiga dan keempat bulan April 2016 yaitu di tanggal 18 April 2016 sampai dengan tanggal 24 April 2016 di 2 lokasi secara bersamaan di Kabupaten Lampung Timur yaitu di Kecamatan Labuhan Ratu dan Kecamatan Braja Caka. Dan tanggal 25 April 2016 sampai dengan 30 April 2016 di 2 lokasi lainnya yaitu Kecamatan Purwasari, Natar dan

di Kecamatan Taman Endah, Kabupaten Lampung Timur. Sasaran peserta yang mengikuti program pemberdayaan dari BP3TKI ini ialah TKI-Purna maupun TKI-B dan keluarganya. Dalam pelaksanaannya, BP3TKI menggandeng mitra lokal yang telah mengetahui kondisi lingkungan dan masyarakat setempat, seperti Gerakan Pemuda Anshor dan SBMI (Serikat Buruh Migran Indonesia) untuk wilayah Kabupaten Lampung Timur.

Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Lampung Timur sering melakukan koordinasi dengan BP3TKI. Pada hari Kamis tanggal 4 Agustus 2016 akan diadakan rapat di Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Lampung Timur yang dihadiri oleh BNP2TKI, BP3TKI, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi dan UMKM, dan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang bertujuan untuk membentuk lembaga penyelesaian permasalahan TKI dan pemberian fasilitas kepada masyarakat untuk berwirausaha.

Secara khusus Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi tidak memiliki program khusus untuk purna buruh migran, karena Dinas hanya menangani masalah pemberangkatan dan koordinasi dengan instansi lain seperti BNP2TKI dan BP3TKI. merasa aman di negara tersebut.

## **KESIMPULAN**

Diperlukan upaya dari pemerintah untuk melakukan pembinaan dan pemberdayaan ekonomi dan sosial bagi purna TKI. Di era desentralisasi, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab dan kewajiban yang cukup besar dalam urusan-urusan kesejahteraan rakyatnya. Namun, koordinasi dan komunikasi juga tetap harus dilakukan dengan pemerintah pusat, instansi-instansi vertikal yang ada di daerah serta keterlibatan pihak ketiga sebagai indikasi pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa Pemerintah Kabupaten Lampung Timur sebagai *leading sektor* pada pengelolaan Purna TKI ini tidak memiliki program/kebijakan yang benar-benar spesifik. Sejauh ini, beberapa inisiatif upaya pengelolaan Purna TKI diinisiasi oleh pihak ketiga, seperti BP3TKI, LSM SBMI dan LSM Sebumi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa koordinasi pengelolaan Purna TKI di Kabupaten Lampung Timur belum terbentuk dan berjalan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ndraha, Taliziduhu., 2011. *Kybernologi 1 Ilmu Pemerintahan Baru*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Salim, Agus, 2006. *Teori dan Paradigma Penelitian Sosial (Edisi 2)*. Yogyakarta: Tiara Wacana

### Jurnal

- Abas, Sayid, Bambang Widyahseno, Rusdianto, “Model Pemberdayaan TKI Pasca Migrasi Melalui Ekonomi Produktif Menuju Keluarga Sakinah”, *Muaddib Vol. 04, No. 01 Januari – Juli 2014*.
- Anwar, Ratih Pratiwi, “Remittances and Village Development in Indonesia: The Case of Former Migrants Workers in South Korea from Ngoro-oro Village in Yogyakarta Special Region Province”, *Thammasat Review Vol. 16 (2013)*
- Barai, Munim K., “Development Dynamics of Remittances in Bangladesh”, *Sage Open 2012*.
- Chandra, Arie I., dan Atom Ginting Munthe, *Profil Pengalaman TKI: Pemberangkatan, Di Luar Negeri dan Kepulangan (Studi Kasus Kotamadya Cianjur, Kotamadya Sukabumi dan Kabupaten Sukabumi)*, Bandung: Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat-UNPAR, 2011.
- Jaya, Nenet Natasudian dan I Gusti Made Subrata, “Model Kewirausahaan Pada Pemberdayaan Buruh Migran (TKI) di Lombok Barat-NTB”, *GaneÇ Swara Vol. 8 No.2 September 2014*
- Fazili, Sameera, ”Remittances and Development”, *Middle East Report, No. 252 (Getting by Global Downturn, Fall, 2009)*.
- Kageyama, Ayako, “Extent of Poverty Alleviation by Migrant Remittances in Sri Lanka”, *South Asia Research Vol. 28 (1)*.
- Kristyana, Naning, dan Choirul Hamidah, “Transisi Peran TKI Purna di Ponorogo, dari Buruh Menjadi Wirausahawan dan Tuan Tanah”, *Jurnal Ekuilibrium, Volume 12, Nomor 1, Maret 2014*.
- Stephenson Jr, Max, “Toward a Descriptive Model of Humanitarian Assistance Coordination” *Voluntas: International Journal of Voluntary and Nonprofit Organization, Vol. 17, No. 1, March 2006*
- Supriana, Tavi dan Vita Lestari Nasution, “Peran Usaha TKI Purna terhadap Pengembangan Ekonomi Lokal dan Faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Usaha TKI Purna di Provinsi Sumatera Utara”, *MAKARA, SOSIAL HUMANIORA, VOL. 14, NO. 1, JULI 2010: 42-50*
- United Nation, 2013, “Contributions of Migrant Domestic Workers to Sustainable Development”, *Policy Papper for The Pre-GFMD VI High Level Regional Meeting on Migrant Domestic Workers at the Interface of Migration and Development*, Bangkok: UN Women.

Website: [www.bnpp2tki.go.id](http://www.bnpp2tki.go.id)

Dokumen Lain:

Munawaroh, Kholifatul, 2015. *Koordinasi Multistakeholder dalam Proses Rekrutmen Buruh Migran Asal Kabupaten Lampung Timur (Studi tentang Koordinasi*



*Multistakeholder di Kecamatan Way Jepara, Kabupaten Lampung Timur*). Skripsi pada Jurusan Ilmu Administrasi Negara, FISIP, UNILA, tidak diterbitkan.